

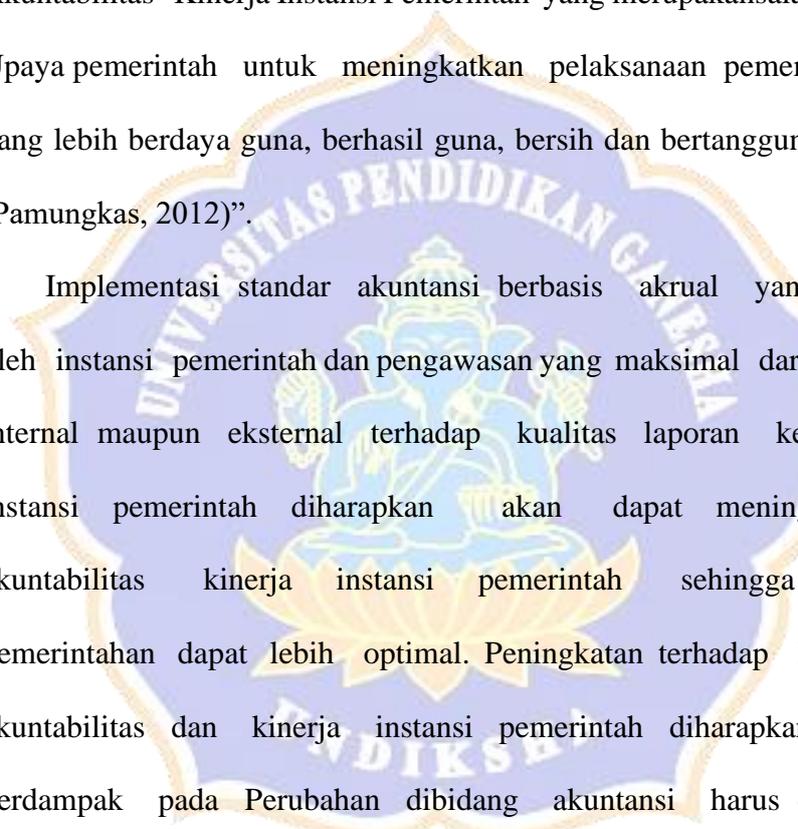
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pergeseran paradigma terhadap pemerintahan saat ini mendorong kita untuk mewujudkan suatu Sistem tata pemerintahan yang baik (good-governance) dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas, sehingga memiliki kredibilitas dalam Penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, yang dimaksud dapat meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan pemerintah daerah terhadap good governance yang dapat tercapai (Riyani, 2019).

Perubahan cara pandang masyarakat terhadap pemerintah saat ini, memaksa kita untuk dapat mewujudkan suatu sistem tata pemerintah yang baik, dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif, serta akuntabilitas. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Rahayu, 2014).

Kinerja pemerintah yang menyajikan laporan keuangan dipengaruhi oleh prinsip tata kelola keuangan yang baik. Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu berupa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab (Pamungkas, 2012)'.

Implementasi standar akuntansi berbasis akrual yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang maksimal dari pihak internal maupun eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja pemerintahan dapat lebih optimal. Peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berdampak pada Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya standar akuntansi di Indonesia yang telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi, maka yang dilakukan adalah peralihan akuntansi pemerintah yang berbasis kas menjadi basis akrual, hal ini mengharuskan implementasi akuntansi pemerintah

berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Rintiani,2013).

Komite standar akuntansi telah menyusun sebagai panduan atas laporan keuangan berbasis akrual yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka penerapan standar akuntansi berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum (Lasabuda,2020). Dengan adanya akuntansi berbasis akrual yang mempunyai landasan hukum. Hal tersebut pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang baru yaitu standar akuntansi berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran baik pemerintah pusat maupun daerah. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) (Sartika,2019).

Undang Undang No. 17 tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara dan pada akhirnya akan diterapkan bagi seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Implementasi SAP berbasis akrual telah dilaksanakan secara bertahap dan pada tahun 2015 semua laporan keuangan Pemerintah telah beralih kebasis akrual, pada tahap pertama telah menetapkan

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah tersebut masih bersifat sementara karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 36 ayat dua (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Standar akuntansi pemerintah perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktik akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintahan. Namun, pada tahun 2010 di sahkan peraturan baru mengenai SAP yaitu tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah yang dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dilaporkan tepat waktu dan dapat diandalkan. Apabila laporan keuangan valid dan berkualitas maka para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi keuangan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat.

Sistem Akuntansi Pemerintahan merupakan serangkaian tata kelola dalam menjalankan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kebijakan akuntansi,serta merupakan bagian dari pengelolaan

keuangan secara keseluruhan (Kartika dan Sukanto,2019). Suprihatin & Ananthy (2019) Dalam hal ini Sistem Akuntansi Pemerintahan disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah mengatur mengenai pengendalian internal dan peraturan pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga mendefinisikan Sistem Akuntansi

Pemerintahan sebagai rangkaian dari prosedur-prosedur secara manual dan juga secara terkomputerisasi yang dimulai dengan melakukan pengumpulan data, pencatatan, lalu pengiktisaran dan kemudian pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pemerintah (Suprihatin- & Ananthy, 2019). Dengan adanya standar akuntansi Berbasis Akrua, maka peraturan pelaksanaan dan system akuntansi sudah pasti akan berubah demikian juga dengan kapasitas dan kemampuan SDM harus ditingkatkan karena SAP Berbasis Akrua memang memberikan informasi keuangan yang lebih baik.

Oleh karena itu, peneliti memilih di kantor camat Rahong Utara sebagai lokasi penelitian tentang Implementasi standar akuntansi berbasis akrua berdasarkan PP No 71 Tahun 2010. Kecamatan Rahong Utara merupakan kecamatan yang belum memahami akuntansi berbasis akrua dalam penyusunan laporan

keuangan, selama menerapkan basis akrual adanya hambatan yang terjadi karena kurangnya komitmen Sumber daya manusia yang dimana hal tersebut menimbulkan sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkompeten di bidang akuntansi seperti para pegawai yang tidak berlatar Pendidikan akuntansi, hal ini tidak sesuai kenyataan yang diharapkan oleh pemerintah kecamatan Rahong Utara. Diperlukan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan teknis terkait standar akuntansi berbasis akrual, maka penambahan staf atau pegawai, diperlukan pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis akrual. Hal ini mempengaruhi suatu implementasi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, disposisi implementor sikap para pelaksana dan kondisi sosial, politik dan ekonomi dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sebagai bentuk keseriusan dalam mengimplementasi standar akuntansi berbasis akrual. Sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam implementasi standar basis akrual yaitu memiliki sifat kompetisi di bidang akuntansi serta memahami akuntansi berbasis akrual.

Implementasi standar akuntansi berbasis akrual di Indonesia bukanlah kesukarelaan semata Pemerintah, melainkan wajib menerapkan akuntansi berbasis akrual supaya menghasilkan

laporan keuangan yang lebih baik dan berguna serta manfaat bagi pengguna dan pemeriksa laporan keuangan. Meskipun demikian penyusunan laporan keuangan berbasis akrual akan membawa dampak implikasi walau sekecil apapun mengenai kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual (Sinambela 2018).

Beberapa studi sebelumnya yang signifikan pada subjek dapat dimasukkan implementasi standar akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Dalam penyusunan Laporan Keuangan yang di angkat sebagai pertimbangan. Zeni Rusmawati (2017) yang berjudul “ Implementasi Standar Akuntansi berbasis Akrual Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 di Pemkot Surabaya” Menunjukkan Bahwa keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak terlepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja. Faktor sumber daya manusia seperti tingkat Pendidikan staf, pelatihan yang diberikan latar Pendidikan .

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **Analisis Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan keuangan (Studi kasus pada kantor Camat Rahong Utara).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan permasalahan yang sedang terjadi saat ini, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya komitmen terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan keuangan di Kantor Camat Rahong Utara
2. Adanya kesulitan karena belum memahami implementasi standar akuntansi berbasis akrual.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini, hanya membahas mengenai analisis Implementasi Standar Akuntansi berbasis akrual. Penelitian membahas suatu objek penelitian hanya pada kantor kecamatan Rahong Utara.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana Dampak Perubahan pada Implementasi standar akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan keuangan pada kantor Camat Rahong Utara.
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah pada kantor Camat Rahong Utara dalam implementasi SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.
3. Bagaimana Upaya pemerintah pada kantor Camat Rahong Utara dalam Implementasi standar akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Mengetahui Dampak terhadap Perubahan Implementasi standar akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan Laporan keuangan pada kantor camat Rahong Utara.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah pada kantor camat Rahong Utara dalam implementasi SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 tahun 2010.
3. Mengetahui Upaya pemerintah pada kantor camat Rahong Utara dalam Implementasi standar akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh manfaat baik teoretis maupun praktis dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung serta berkontribusi terhadap Jurusan Akuntansi dengan judul yaitu Analisis Implementasi Standar Akuntansi berbasis Akrual Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

2. Manfaat Praktis

Bagi para Pemerintah Kecamatan Rahong Utara penelitian ini dapat membawa manfaat yang baik dalam Penerapan Implementasi standar Akuntansi berbasis akrual dan mengatasi kendala dalam penyusunan Laporan Keuangan khususnya pada Kantor Camat Rahong Utara

